TAJUK RENCANA

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

BURUH di DIY meminta agar upah minimum provinsi (UMP) dinaikkan sebesar 50 persen pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di DIY dan sekitarnya sekitar Rp 3 juta perbulan. Terkait hal itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengajukan kenaikan upah sebesar Rp 4 juta perbulan. Mungkinkah hal itu terealisasi ?

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan tuntutan buruh soal UMP naik 50 persen merupakan aspirasi yang wajar. Menurutnya, besarannya harus disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan serta kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian (KR 9/10). Berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tak pernah tuntutan semacam itu diakomodasi seratus persen. Antara harapan dan kenyataan selalu saja timpang.

Namun, sebagaimana disampaikan Sekda DIY bahwa tuntutan buruh sebagai hal yang wajar, maka tak perlu ada yang merespons secara berlebihan, melainkan harus proporsional. Antara kebutuhan hidup buruh dengan kemampuan perusahaan harus dikompromikan. Artinya, harus ada dialog secara proporsional antara pengusaha dan buruh. Dari situlah nanti akan tercapai titik temu yang disepakati para pihak.

Meski demikian, dalam penentuan upah, pemerintah telah memberi pedoman berupa Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP No 36 Tahun 2021. Mengacu pada PP tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan, salah satunya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Kebijakan pengupahan tersebut antara lain mencakup kebijakan penetapan upah minimum oleh gubernur setiap tahun dan kebijakan penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Sedangkan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

Dengan demikian, untuk menetapkan besaran UMP memang tak boleh hanya sepihak dan nanti akan dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan ini diharapkan mengakomodasi tuntutan buruh/pekerja maupun aspirasi pengusaha. Sementara proses penetapan UMP saat ini sedang dibahas di tingkat nasional maupun provinsi. Harapannya, antara tuntutan buruh/pekerja tak jauh berbeda dengan hasil survei KHL di DIY.

Kita tentu sangat memaklumi kondisi perekonomian saat ini tidak sedang baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingkat inflasi yang cenderung tinggi menjadi variabel yang sangat diperhitungkan dalam penyesuaian UMP. Di sisi lain, daya beli masyarakat yang tak kunjung membaik, merupakan faktor yang tak boleh diabaikan dalam penentuan UMP. Kita menginginkan ada titik temu antara keinginan buruh dan keinginan pengusaha, sehingga perekomonian tetap terjaga.

Dengan kata lain, tak boleh ada dominasi dalam penentuan UMP, baik dari pekerja maupun pengusaha—meski dalam kenyataannya tingkat bargaining buruh masih sangat lemah. Titik kompromi itu harus didasarkan pada realitas di lapangan, baik yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun daya beli masyarakat. Pemerintah hendaknya tak sekadar menjadi regulator, melainkan juga menjadi 'wasit' yang adil ketika terjadi perselisihan antara buruh dengan pengusaha. ❑-d

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. I**SSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Fenomena Manusia Silver

Baharuddin Kamba

FENOMENA maraknya manusia silver tidak hanya kita temukan di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi hampir di semua kota/kabupaten di Pulau Jawa, bahkan menyebar di luar Pulau Jawa, keberadaan manusia siver mudah dijumpai, termasuk di Yogyakarta.

Pengguna jalan terutama di perempatan lampu merah dengan mudah menemui manusia silver dengan ciri khasnya, yakni seluruh tubuh penuh dengan cat warna silver. Manusia-manusia silver ini identik dengan orang-orang dengan tubuh berwarna cat silver yang bergerak seperti robot. Mereka biasanya juga membawa kardus untuk menampung uang donasi atau uang hasil mengemis dari para pengguna jalan.

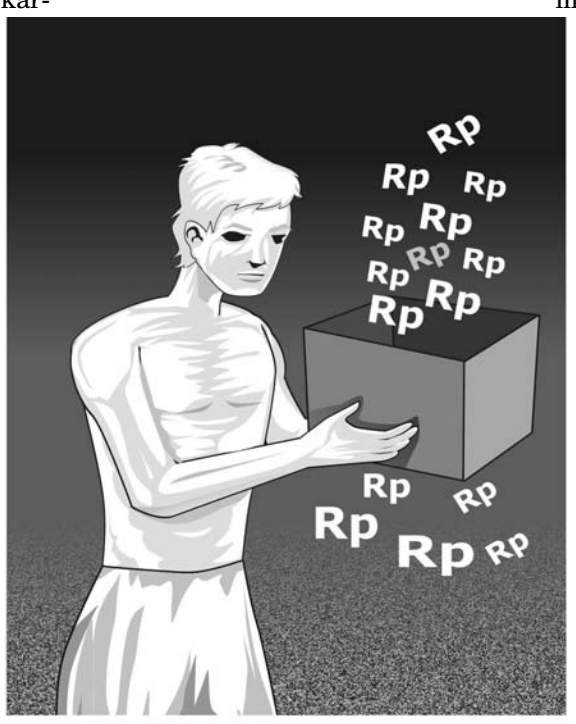

KR-JOKO SANTOSO

Fenomena manusia silver ini kian berganti peran, dari pengekspresian seni di jalanan menjadi pemanfaatan untuk mengemis di jalanan. Adanya potensi eksploitasi terhadap anak semakin meningkat bila fenomena manusia silver ini tak segera dihentikan. Dan tentunya ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, tak sekadar menghentikan atau melarang aktivitas manusia silver di jalanan.

Manusia silver tidak sendirian dalam melakukan aksinya, karena biasanya pasangan suami istri atau keluarga terdekat mereka, misalnya anak. Manusia silver berdiri tanpa mengeluarkan suara, terutama pada saat lampu *traffic light* berwarna merah atau para pengendara berhenti. Selang beberapa menit bahkan hanya hitungan detik, manusia silver mengampiri pengguna jalan berharap diberikan sejumlah uang.

Manusia silver seringnya beraksi pada siang hingga sore hari. Jarang malam hari. Tak jarang orang menilai aksi ini merupakan mengemis dengan modus manusia silver.

Keberadaan manusia silver menimbulkan prokontra di masyakarat. Sebagian menganggap keberadaan mereka hanya sebatas hiburan seniman jalanan semata, namun sebagian masyarakat menilai keberadaan mereka tak bedanya dengan pengemis di jalanan lainnya dan dapat mengganggu kenyamanan dalam berkendara.

Pro kontra yang lazim terjadi di masyakarat atas fenomena sosial yang sedang terjadi seperti fenomena manusia silver.

Penghasilan Menggiurkan

Fenomena manusia silver yang kian marak khususnya di Kota Yogyakarta disinyalir disebabkan oleh sikap kedermawanan masyarakat, termasuk para wisatawan yang berkunjung di Kota Yogyakarta. Hal ini membuat penghasilan para manusia silver sangat menggiurkan. Karena bisa melebihi pendapatan para apatur sipil negara atau ASN. Bayangkan saja pendapatan mereka per harinya bisa mencapai Rp. 600 ribu. Jika dalam satu bulan atau dikalikan tiga puluh hari pendapatan yang hasilkan oleh manusia silver bisa mencapai Rp 18 juta.

Penghasilan manusia silver sungguh sangat menggiurkan. Para manusia silver lebih memilih cara instan seperti mengemis karena tidak harus bersusah-susah.

Pemeritah bersama masyarakat perlu mengetahui apa yang menyebabkan mereka menjadi manusia silver dan melakukan hal tersebut kemudian dicarikan solusinya sesuai keinginan yang manusia silver harapkan. Karena jika kita berikan solusi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, dikhawatirkan mereka akan turun ke jalan lagi mengemis dengan cara manusia silver.

Karena mendapatkan uang dengan menjadi manusia silver adalah cara yang instan untuk mendapatkan uang ketimbang bekerja. Peran keluarga sangat dominan untuk menyadarkan para manusia silver yang tak bedanya dengan mengemis, sehingga perlu adanya peran keluarga dengan memberi penyadaran tentang manusia silver sama dengan pengemis, maka akan dapat mengurangi jumlah manusia silver di jalanan.

Dengan demikian, pada akhirnya manusia silver bukanlah jenis pekerjaan yang baik dan diperbolehkan apalagi disarankan, terlebih mereka bertarung dengan kesehatannya karena kandungan zat dalam cat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh.

Mungkin beberapa orang kehilangan mata pencaharian karena tidak lagi menjadi mausia silver. Namun, menjadi manusia silver bukanlah pekerjaan yang baik dan tidak disarankan. Sebab pada akhirnya, mereka menjadi dimudahkan dan terkesan meminta-minta dengan penghasilan yang cukup menggiurkan.

Jadi, pemerintah dan masyarakat seharusnya lebih melek dan terbuka dengan fenomena sosial manusia silver seperti ini, dengan mengadakan pelatihan kerja, menambah atau memperluas lapangan pekerjaan. Para pelaku manusia silver ini juga tidak usah takut dengan hal-hal yang baru, mereka harus memulai dan mencoba. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. ❑-d

*) ***Baharuddin Kamba,*** *Anggota Forum Pemantau Independen Pemerintah Kota Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

MENYAMBUT HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA 10 OKTOBER

Komunikasi Strategis Kesehatan Jiwa

William E Aipipidely

KESEHATAN jiwa belum menjadi isu strategis dalam perbincangan kebijakan publik, apalagi diskursus politik terkini. Walu demikian, isu ini secara global telah menjadi perhatian lembaga-lembaga multilateral. Apakah isu kesehatan jiwa juga merupakan isu mayor dalam kampanye pilkada 2024? Bagaimana mengkomunikasi isu kesehatan jiwa secara lebih strategis?

Banyak media arus utama, ANTARA misalnya, mencatat dari data kementerian kesehatan melalui survei kesehatan Indonesia di 2023, menunjukkan bahwa dua persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami masalah kesehatan jiwa, dan tiga masalah dengan prevalensi tertinggi: depresi, kecemasan,dan schizophrenia. Sedang dari data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rilisnya melaporkan satu dari delapan orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa. Artinya sangat signifikan!

Pada beberapa tahun terakhir kasus-kasus bunuh diri di kalangan gen Z juga melonjak. Rumah sakit jiwa dan rumah-rumah singgah juga kebanjiran pasien orang dengan ganguan jiwa. Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa (RPKJ) Yayasan SATUNAMA bekerja sama dengan *Canada Fund* melalui program *Local Development Initiatives,* menjalankan project Literasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Perempuan Disabilitas Psikososial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat dalam mengelola kesehatan reproduksi dan seksualitas masyarakat desa, khususnya perempuan disabilitas psikososial sebagai penerima manfaat utama serta penerima manfaat secara tidak langsung yakni keluarganya!

Hak Kespro PDDP

Di tahun ini tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah kesehatan mental di tempat kerja. Belakangan ini makin banyak institusi dan perusahaan yang tidak saja menerima pekerja yang difable, tetapi mulai masuk pada kesadaran tempat kerjanya juga harus memperhatikan dengan seksama kesehatan mental pekerja. Isu hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas psikotik (PDDP) adalah sub isu dari perbincangan tentang kesehatan mental. Pada kelompok ini jika tidak cukup inklusi kebijakan dalam tata kelola organisasi, serta pemahaman yang cukup di level komunitas dan keluarga, maka akan terjadi aneka diskriminasi. Dari pokok inilah literasi tentang kesehatan jiwa khususnya pada PDDP diangkat dalam *intervensi project local development inisiatives.*

Dalam kehidupan sosial, perempuan dengan disabilitas psikososial seringkali mendapatkan stigma dan diskriminasi. Maka, permasalahan disabilitas psikososial tidak dapat dilepaskan dengan membicarakan problematika hidup, terutama hak-hak perempuan dengan disabilitas psikososial yang masih jauh dari kata terpenuhi. Dari lensa gender misalnya, memberikan perspektif untuk memahami bagaimana pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan penyandang disabilitas psikososial (PDDP) dalam posisi mereka yang rentan dan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender.

Fenomena kekerasan berbasis gender terhadap perempuan penyandang disabilitas psikososial kian hari kian marak terjadi. Stigmatisasi kepada perempuan disabilitas sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya menjadi salah satu alasan mengapa perempuan disabilitas rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Di samping demikian, minimnya pengetahuan dan pemahaman perempuan dengan disabilitas psikososial tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi dan seksual menambah kompleksnya permasalahan kerentanan mereka. Fakta-fakta di atas memberikan kita perenungan bagaimana literasi tentang kesehatan jiwa secara umum dan kesehatan jiwa, khususnya pada PDDP mulai dipikirkan dalam pembiayaan pemerintah. Dalam konteks Yogyakarta, pembiayaan dana keistimewaan untuk literasi kesehatan jiwa harus dibuka dalam diskursus legisilasi di DPRD Propinsi, DRPD Kota dan Kabupaten. Ingat, Yogyakarta adalah salah satu kota yang cukup tinggi orang dengan ganguan jiwa. Artinya, ini isu strategis yang perlu dibawa ke panggung legislasi!

Konvergensi Media

Dalam kacamata diskursus publik dan politik kontemporer, isu kesehatan jiwa tidak terlalu menarik dari perpektif demokrasi elektoral. Dari basis inilah, komunikasi strategis dengan sayap konvergensi media ñ media arus utama, media sosial, jurnalisme warga ñ dapat menjadi peluru untuk ditembak ke semua stakeholders politik dan pemerintahan agar isu ini tidak semata topik pinggiran dari kelompok masyarakat sipil, tetapi ia telah menjadi atensi parpol dan para politisi yang nanti bertarung di pilkada 2024. Konvergensi media jadi jawaban! ❑-d

*) ***William E Aipipidely MA,*** *Alumnus Pasca Sarjana Komunikasi UGM & Konsultan Management Program Dana Indonesiana Kemendikbudristek RI.*

Pojok KR

Presiden terpilih Prabowo janji sejahterakan hakim.

-- Pekerja juga butuh disejahterakan.

***

KPK tetapkan Gubernur Kalsel tersangka.

-- Peringatan keras bagi kepala daerah lain.

***

Wulan Guritno diperiksa kasus judi daring.

-- Jangan pura-pura tidak tahu.

Berabé